

Naskah akhir
11 APRIL 2012
MALAM



**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2011-2012**

KAMIS, 12 APRIL 2012

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
2012**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI
PENUTUPAN MASA SIDANG III
TAHUN SIDANG 2011-2012**

KAMIS, 12 APRIL 2012

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,
Salam Sejahtera bagi kita semua,

Yang kami hormati,

- **Para Wakil Ketua,**
- **Pimpinan Komisi, Badan-Badan, dan Alat Kelengkapan,**
- **Para Anggota DPR-RI,**
- **Jajaran Sekretariat Jenderal,**
- **Hadirin yang berbahagia,**

Hari ini Dewan segera akan menutup Masa Sidang III Tahun Sidang 2011–2012, yang telah dimulai sejak tanggal 9 Januari 2012 yang lalu. Masa Sidang III berjalan selama 70 hari kerja. Lebih dari 2 bulan, Dewan melaksanakan tugas konstitusionalnya, yang dikelompokkan ke dalam pelaksanaan fungsi legislasi (60%), dan kelompok anggaran dan pengawasan (40%).

Selain menjalankan tiga fungsi Dewan, penetapan pejabat publik telah mendapat porsi bahasan oleh komisi-komisi Dewan sesuai dengan prosedur dan mekanisme Dewan. Pejabat publik dimaksud adalah: anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah ditetapkan 2 (dua) dari 6 (enam) calon oleh Rapat Paripurna Dewan; anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pengganti Antar waktu (2 orang dari 33 calon); anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU), 7 dari 14 calon; dan Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), 5 dari 10 calon. Untuk anggota Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Komisi VIII telah melakukan pertimbangan terhadap 9 calon yang diajukan oleh Pemerintah. Empat calon telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota, dan 5 (lima) calon dikembalikan. Pencalonan ini sedang dalam proses. Satu lagi yang telah mendapatkan persetujuan dalam rapat paripurna Dewan yaitu, Kantor Akuntan Publik (KAP) Calon Pemeriksa Keuangan BPK RI TA 2012.

Sementara itu, nama-nama calon anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagaimana yang telah disampaikan melalui Surat Presiden tertanggal 5 April 2012, masih akan diproses pada Masa Persidangan IV yang akan datang.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, semula DPR menargetkan 12 (dua belas) RUU dapat diselesaikan dalam Masa Sidang III tahun 2011-2012, termasuk di antaranya RUU Kumulatif terbuka. Namun, dalam perjalanannya beberapa RUU Prioritas yang diperkirakan selesai, ternyata masih ditunda pengambilan keputusan pada pembicaraan tingkat II, karena ada beberapa substansi pokok yang masih memerlukan pematangan. Masih diperlukan diskusi-diskusi/dialog untuk mendapatkan kesepakatan dan kesepakatan bersama, terutama antara DPR dan Pemerintah.

RUU tersebut di antaranya adalah: [1] RUU tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar (P3L). Pembahasan RUU ini mengalami kebuntuan terkait masalah pembentukan lembaga pengawas; [2] RUU tentang Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. RUU ini terus dibahas untuk mencari titik temu, mengakomodasi, baik kepentingan nasional maupun rasa keadilan masyarakat Yogyakarta, terutama terkait keistimewaan Yogyakarta dalam hal penetapan/pemilihan gubernur dan wakil gubernur kepala daerah; [3] RUU tentang Aparatur Sipil Negara, masih ada beberapa substansi yang belum dapat diselesaikan. Ada dua isu sentral yang masih dipermasalahkan yaitu Komisi Aparatur Sipil Negara dan pejabat Eksekutif Senior. Beberapa materi juga masih memerlukan konsolidasi internal di kalangan Pemerintah; [4] RUU tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih ada materi yang krusial yang harus diselesaikan; [5] RUU tentang Pendidikan Tinggi, [6] RUU tentang Pendidikan Kedokteran.

Khusus untuk RUU Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Kedokteran, Komisi X memberikan catatan bahwa ada jaminan dari Pemerintah, bahwa kedua RUU tidak akan dilakukan pembatalan dan diselesaikan pada satu kali masa sidang, yaitu pada awal Masa Sidang IV 2011-2012. Dalam hal penambahan substansi dari Pemerintah untuk penyempurnaan RUU, bahwa rumusan tersebut tidak akan mengubah substansi RUU hasil keputusan Panja Komisi X DPR-RI. Beberapa RUU lainnya, yaitu RUU tentang Koperasi, RUU tentang Lembaga Keuangan Mikro, RUU tentang Pengurusan Piutang Negara dan Piutang Daerah, oleh Rapat Paripurna telah diperpanjang masa pembahasannya.

Dengan demikian, untuk Masa Sidang III hanya ada 2 (dua) RUU Prioritas yang dapat diselesaikan yaitu RUU tentang Penanganan Konflik Sosial dan RUU tentang Perubahan Atas UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, ditambah 4 (empat) RUU

Kumulatif terbuka yang terdiri dari tiga RUU Konvensi dan satu RUU tentang Perubahan Atas UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012. Tiga RUU Konvensi tersebut yaitu RUU tentang pengesahan Konvensi ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme; RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah RI dengan Pemerintah Daerah Administrasi Khusus Hongkong RRC tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana, dan; RUU tentang Pengesahan Konvensi Internasional mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran dan Anggota Keluarganya.

Alhamdulillah, RUU Perubahan UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, yang disepakati sebagai RUU pengganti karena substansi perubahannya lebih dari 50%, yang ditargetkan harus selesai dalam masa sidang ini, dapat dituntaskan. Empat materi krusial akhirnya dapat diambil keputusan setelah melalui perdebatan yang cukup panjang dan menguras energi. Dengan selesainya RUU ini, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) segera bersiap melaksanakan tugas dalam menetapkan pentahapan Pemilu Legislatif 2014. Dengan UU Pemilu yang baru, diharapkan Pemilu 2014 dapat berjalan dengan lebih baik yang akan menghasilkan anggota DPR, DPD dan DPRD dengan derajat keterwakilan yang tinggi. Kita berharap Pemilu 2014 dapat berlangsung dengan lebih murah dari segi biaya, lebih mudah dalam pelaksanaannya, dan hasilnya lebih berkualitas. Perlu dipikirkan agar UU Pemilu sebaiknya dapat diberlakukan untuk jangka panjang, setidaknya untuk tiga sampai empat kali Pemilu.

Melihat jumlah RUU yang dihasilkan dalam Masa Sidang III ini, kita cukup prihatin. Namun perlu dipahami bahwa banyak kendala yang ditemui dalam pembahasan, terutama terhadap pasal-pasal yang sulit menemukan kesepakatan bersama antara DPR dan Pemerintah. Kendala ini semata-mata tidak datang dari DPR, tetapi juga datang dari Pemerintah, terutama apabila sampai kepada usulan pembentukan struktur dan lembaga baru. Belum mantapnya konsolidasi di kalangan Pemerintah juga menjadi kendala utama, di samping ada perdebatan di antara fraksi-fraksi DPR. Di samping itu, terdapat beratus-ratus Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang harus dikaji, memerlukan waktu panjang dalam pembahasan.

Pimpinan DPR sangat paham bahwa komisi-komisi dan Baleg telah bekerja sangat efektif untuk menyiapkan RUU yang akan menjadi inisiatif DPR sebagaimana perintah UU. Kajian naskah akademik, mendapatkan masukan dari masyarakat, dunia perguruan tinggi, pemangku kepentingan, uji publik, sosialisasi, dilakukan oleh berbagai Alat Kelengkapan Dewan untuk memenuhi target RUU prioritas dalam Program Legislasi Nasional.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan fungsi anggaran, Komisi-Komisi DPR dan Pemerintah telah melakukan bahasan berkaitan dengan Evaluasi Kinerja Kementerian Tahun Anggaran 2011, Realisasi Anggaran Kementerian TA 2011, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK-RI, dan Rencana Program Kerja Kementerian Tahun 2012.

UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3 dan UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa apabila terjadi perubahan signifikan terhadap asumsi ekonomi makro dan/atau postur APBN, Pemerintah mengajukan RUU tentang Perubahan APBN tahun anggaran berjalan. Terkait dengan perubahan harga minyak dunia yang telah melampaui angka psikologis di atas USD 100,0 per barel, yang mengakibatkan beban subsidi BBM dan subsidi listrik dalam APBN makin membengkak, maka Pemerintah telah mengajukan kepada DPR RUU tentang Perubahan Atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012.

Beberapa hal yang telah disetujui di dalam APBN Perubahan di antaranya yaitu: [1] Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp. 1.358,2 triliun, terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp. 1.106,2 triliun, PNPB sebesar Rp. 341,1 triliun, dan hibah sebesar Rp. 0,8 triliun. [2] Belanja Negara sebesar Rp. 1.548,3 triliun, terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.069,5 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp. 478,8 triliun. [3] Subsidi energi sebesar Rp. 225,4 triliun, terdiri dari subsidi BBM jenis tertentu dan LPG Tabung 3 Kilo sebesar Rp. 137,4 triliun, subsidi listrik sebesar Rp. 65,0 triliun dan cadangan resiko energi sebesar Rp. 23,0 triliun.

Dalam rapat antara Komisi-Komisi, Banggar dan Pemerintah, menghasilkan kesepakatan penting mengenai Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun Anggaran 2012 yakni: pertumbuhan ekonomi ditetapkan sebesar 6,5% atau turun sebesar 0,2% dari APBN; tingkat inflasi sebesar 7% atau naik 1,7% dari APBN.

Di samping itu, tingkat suku bunga SPN tiga bulan disepakati pada kisaran 5% atau turun 1,0% dari APBN; Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) disepakati sebesar Rp. 9.000 per 1 USD. Harga patokan Minyak Mentah Indonesia (*Indonesian Crude Price*) disepakati bersama sebesar 105,0 USD per 1 barel; dan Lifting minyak mentah disepakati sebesar Rp. 930.000 barel per hari. Angka *lifting* ini lebih rendah dari kesepakatan dalam APBN, yakni sebesar 950.000 barel per hari.

Berkaitan dengan kesepakatan yang telah diambil dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, Dewan sangat mendukung langkah penghematan anggaran belanja yang dilakukan sebagian besar Kementerian dan Lembaga Pemerintah. Oleh karena itu, Dewan mendukung kebijakan untuk menambah alokasi anggaran untuk Belanja Modal dalam APBN Perubahan Tahun 2012, walaupun alokasi anggaran belanja modal masih relatif kecil.

Lonjakan harga minyak mentah yang terjadi di pasar internasional serta melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, berdampak terhadap peningkatan defisit anggaran. Dalam UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, defisit anggaran ditetapkan sebesar 1,53% terhadap PDB. Dewan memahami kesulitan yang dihadapi Pemerintah apabila tidak dapat menekan beban anggaran subsidi, baik subsidi energi maupun non-energi. Oleh karena itu, Dewan sepakat angka defisit anggaran sebesar 2,23% dari PDB dan masih sesuai ketentuan dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Sidang Dewan yang terhormat,

Usulan kenaikan BBM bersubsidi oleh Pemerintah melalui perubahan UU No. 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun Anggaran 2012, telah mengundang perbedaan pendapat yang tajam antara Fraksi-Fraksi di DPR, juga telah mendorong maraknya aksi-aksi penolakan oleh kelompok-kelompok masyarakat, tidak saja di Jakarta tetapi juga di daerah. Akhirnya Rapat Paripurna pengambilan keputusan atas RUU tersebut telah memutuskan untuk menerima opsi penambahan ayat (6A) pada Pasal 7 berikut penjelasannya.

Dengan adanya keputusan tersebut, kita berharap bahwa semua pihak dapat menerimanya dengan baik. Dengan keputusan ini, artinya, harapan rakyat agar harga BBM tidak naik per 1 April 2012 sudah terakomodir. Namun demikian, dalam hal pengelolaan keuangan negara, DPR masih memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tertentu, dalam batas-batas tertentu yang diharapkan tidak memberatkan masyarakat.

Sebelum pengambilan keputusan tingkat II dilakukan, Rapat-Rapat Komisi dengan Pemerintah telah melakukan bahasan secara intens mengenai masalah BBM bersubsidi, dan DPR telah memberikan rekomendasi terhadap langkah-langkah yang perlu diambil Pemerintah, di antaranya Pemerintah diminta mempersiapkan *roadmap* percepatan pembangunan infrastruktur non-subsidi (seperti kilang, tangki timbun, terminal, mobil tangki dan SPBU), menyusun rencana terpadu percepatan konversi BBM ke BBG (Bahan Bakar Gas) yang meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBBG), dan *converter kit*. Mempersiapkan rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat. Pemerintah juga diminta mempersiapkan Program Kerja Tim Koordinasi Penanggulangan, Penyalahgunaan, Penyediaan, dan Pendistribusian BBM (TKP4BBM) dalam rangka mengawal penggunaan BBM agar tepat sasaran.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam hal pelaksanaan fungsi pengawasan DPR, Komisi-Komisi DPR telah melakukan bahasan dalam Rapat-Rapat Kerja dengan Pemerintah untuk merespon permasalahan-permasalahan yang berkembang, baik dalam bidang politik-keamanan, ekonomi, sosial-kemasyarakatan, maupun hal-hal lainnya yang meminta perhatian penanganan.

Dalam hal politik-keamanan dan perkembangan situasi dalam negeri, pada tanggal 20 Februari 2012 telah dilakukan pertemuan dengan ketua-ketua lembaga negara. Adapun tema pertemuan yaitu "Membangun Demokrasi Yang Baik Menuju Pemilu 2014". Akhir pertemuan, melalui Ketua DPR selaku tuan rumah pertemuan, disampaikan *Joint Press Statement*, yang intinya bahwa banyak kemajuan yang telah dicapai bangsa dalam kehidupan demokrasi, namun demikian, masih perlu dibangun demokrasi yang lebih sehat dengan penguatan etika dan *rule of law*. Nilai-nilai demokrasi yang bersifat universal dipilih karena merupakan amanat Bapak Bangsa Pendiri Republik Indonesia. Pengalaman menuju konsolidasi demokrasi yang berkualitas masih diwarnai adanya paradoks demokrasi, dari nilai demokrasi konstitusional yang didambakan. Sejumlah realitas menunjukkan masih ada kelemahan dalam berdemokrasi, yakni masih adanya praktek kekerasan di masyarakat, pragmatisme transaksional terutama pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada, maupun permasalahan-permasalahan institusionalisasi politik yang berpotensi pada munculnya *political distrust*. Dalam konteks ini, Pemerintah dan perangkat lembaga negara dituntut bersikap tegas, menegakkan hukum, dan bukan memberikan ruang aksi kekerasan atau anarkisme atas nama kebebasan dan demokrasi.

Sidang dewan yang terhormat,

Penembakan oleh kelompok bersenjata di Papua terhadap warga sipil dan juga terhadap aparat keamanan, masih saja terjadi dan sangat sulit untuk ditangkap pelakunya. Terakhir adalah penembakan terhadap Pesawat Trigana yang menewaskan seorang wartawan, melukai penumpang lain serta pilot dan co-pilot. Untuk wilayah Papua memang harus dilakukan pengamanan optimal dan aparat harus berusaha agar situasi keamanan benar-benar dapat terkendali, sehingga rakyat dapat melakukan aktifitas sehari-hari dengan rasa aman. POLRI harus bersinergi bersama TNI untuk melaksanakan tugas secara profesional. Terkait dengan potensi perbuatan makar dari Organisasi Papua Merdeka (OPM), Dewan mendorong agar Pemerintah dan aparat keamanan, dapat lebih mengedepankan upaya-upaya preventif, memberikan kesadaran kepada para pengikut OPM dalam kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat, dalam suasana aman dan nyaman dalam bingkai NKRI.

Kondisi keamanan di Aceh selama pelaksanaan Pemiluakada baru-baru ini patut kita syukuri. Pemiluakada telah dilaksanakan serentak dan situasinya berjalan dengan tertib. Rakyat Aceh telah menggunakan haknya memilih para pemimpin mereka. Memang, sebelum berlangsungnya Pemiluakada sempat terjadi teror di sana-sini, namun dapat diatasi. Bagi kita, siapapun pemenang Pemiluakada ini, dialah pilihan rakyat yang terbaik, yang akan membawa rakyat Aceh kepada kesejahteraan, perdamaian, persatuan dan kesatuan.

Sidang Dewan yang terhormat,

Pada Masa Sidang III Tim Pengawas Kasus Bank Century telah melakukan rapat dengan penegak hukum, yaitu Kapolri, Jaksa Agung dan KPK. Tim Pengawas memberi kesempatan dan mendorong KPK menyelesaikan secara tuntas kasus Bank Century, dan meminta KPK menyampaikan *progress report* penyelesaian kasus ini. Dalam Rapat Kerja dengan KPK, Komisi III mendesak KPK untuk mempercepat penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi, khususnya yang menjadi perhatian masyarakat dan berdampak sistemik terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi secara profesional dan akuntabel, untuk memberikan rasa keadilan masyarakat. Komisi juga mendukung KPK untuk meminta BPK melakukan audit kinerja terhadap KPK untuk terwujudnya lembaga KPK yang independen, kredibel, akuntabel, dan profesional.

Pembahasan tindak lanjut UU No. 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) telah dibahas oleh Komisi IX dengan PT. Askes (Persero) dan PT. Jamsostek (Persero) dalam rangka persiapan operasional BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan meliputi program-program PT. Askes termasuk program Askes Sosial dan peningkatan pelayanan peserta Askes di rumah sakit. Dewan juga mendesak PT. Askes untuk dilakukan audit lengkap oleh akuntan publik dan BPK, dan tidak mengambil langkah-langkah pengalihan aset sebelum keluarnya hasil audit.

Dengan PT. Jamsostek (Persero), Dewan meminta kesiapannya menuju transformasi PT. Jamsostek menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Komisi Dewan mendesak PT. Jamsostek (Persero) untuk memasukkan hasil audit BPK tahun 2011 dalam *roadmap* yang telah dipersiapkan, serta mendorong PT. Jamsostek untuk melaksanakan *roadmap* tersebut.

Sidang Dewan yang terhormat,

Sertifikasi guru dengan berbagai permasalahannya tak lepas dari perhatian kita semua. Sebagai tenaga profesional, guru mempunyai kedudukan penting dalam jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan anak usia dini. Undang-undang No. 14 Tahun

2005 tentang Guru dan Dosen mengamanatkan, guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sertifikasi guru yang sudah mulai dilaksanakan sejak tahun 2007 hingga saat ini dan diharapkan selesai pada tahun 2014, merupakan kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas guru dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan mereka melalui tunjangan profesi.

Dewan meminta agar sertifikasi guru dapat dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan perundangan serta juklak yang telah disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan perlunya ditingkatkan pengawasan atas pelaksanaan sertifikasi tersebut.

Sidang Dewan yang berbahagia,

DPR terus memantau adanya sorotan terhadap tidak transparannya pengelolaan dana setoran calon jamaah haji yang dikelola oleh Kementerian Agama. Dalam hal ini, kita tentu setuju apabila dilakukan audit secara menyeluruh terhadap dana-dana yang disetorkan oleh calon jamaah haji. Dewan juga perlu mempertimbangkan adanya revisi UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dalam rangka menciptakan cetak biru (*blueprint*) mengenai tata kelola penyelenggaraan ibadah haji yang sehat.

Terkait dengan usulan KPK untuk penghentian sementara pendaftaran calon jamaah haji yang berpotensi penyelewengan, membutuhkan pemikiran dan kajian yang mendalam agar tidak memunculkan persoalan baru yang terkesan menghalangi calon jamaah haji dalam melakukan ibadahnya. Peningkatan kualitas pelayanan dan manajemen penyelenggaraan haji dan transparansi pengelolaan dana tentunya menjadi persoalan utama yang harus segera diselesaikan.

Masalah narkoba yang marak dalam pemberitaan media massa akhir-akhir ini tak luput pula dari perhatian kita. Meningkatnya konsumsi narkoba dan peredarannya ditengarai telah merambah, tidak saja kepada masyarakat, tetapi juga terhadap sejumlah oknum aparat penegak hukum. Hal ini sangat membahayakan sekaligus memprihatinkan. Keseriusan dan tindakan konkret dari penegak hukum, perlu terus didorong guna menyelamatkan generasi muda dari bahaya ini. Perlu dilakukan pemutusan mata-rantai jaringan narkoba yang sudah begitu canggih dan eksis di setiap lapisan masyarakat.

Sidang Dewan yang terhormat,

Kecelakaan lalu lintas darat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini, mendapatkan perhatian masyarakat. Jumlah korban sangat memprihatinkan. Dari catatan, selama tiga bulan

terakhir, telah terjadi 14 kecelakaan dalam kategori besar dengan jumlah korban meninggal sekitar 72 orang dan 177 cedera berat dan ringan. Belum lagi kecelakaan pengendara sepeda motor yang juga meminta korban. Dengan angka kematian yang begitu tinggi, kita patut bertanya, betapa buruknya manajemen transportasi darat, baik berkaitan dengan sarana jalan, tidak tersedianya lintasan Kereta Api (KA), rambu-rambu lalu lintas yang tidak memadai, dan angkutan umum yang tidak layak jalan, termasuk ketidakdisiplinan pengendara. Sudah saatnya otoritas perhubungan darat melakukan upaya untuk dapat memperbaiki dan meningkatkan manajemen transportasi.

Sidang Dewan yang terhormat,

Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, BAKN dan Komisi-Komisi DPR-RI telah dan akan mencermati Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun Anggaran 2011 BPK-RI yang telah diserahkan pada tanggal 4 April yang lalu. Laporan BPK tersebut terdiri atas pemeriksaan kinerja 143 objek pemeriksaan, yaitu 30 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Pusat, 56 objek pemeriksaan di lingkungan Pemerintah Daerah, 9 objek pemeriksaan di lingkungan BUMN, 29 objek pemeriksaan di BUMD, dan 19 objek pemeriksaan di lingkungan BLU.

Ketua BPK-RI melaporkan bahwa, meskipun berbagai kemajuan telah dicapai dalam pengelolaan keuangan negara oleh Pemerintah, namun hasil Pemeriksaan Semester II TA 2011 menggambarkan masih terdapat berbagai kelemahan dalam pengelolaan keuangan negara dan memerlukan perbaikan. Oleh karenanya, Pimpinan Dewan mengharapkan BAKN dapat meneliti, mengkaji dan mengevaluasinya, untuk selanjutnya disampaikan kepada Komisi-Komisi untuk ditindaklanjuti.

Sidang Dewan yang terhormat,

Diplomasi parlemen juga menjadi bagian dari kegiatan DPR-RI pada Masa Persidangan III. DPR-RI telah mengirimkan berbagai delegasi ke berbagai pertemuan, baik regional maupun internasional dalam tingkat parlemen.

Kehadiran delegasi DPR RI pada Sidang Tahunan *Asia Pacific Parliamentary Forum* (APPF) ke-20 di Tokyo, Jepang, pada tanggal 8-12 Januari 2012 telah mewarnai jalannya sidang. Dalam kesempatan ini, Delegasi mengingatkan negara-negara kawasan mengenai pentingnya meratifikasi CTBT (*Comprehensive Nuclear Test-Ban Treaty*), sebagaimana telah dilaksanakan Indonesia pada akhir tahun lalu, sebagai bagian dari komitmen untuk menjaga perdamaian dan stabilitas keamanan di kawasan. Delegasi DPR RI berhasil meloloskan tiga

usulan draft resolusi, yaitu yang berkaitan dengan MDGs, Perdamaian Timur Tengah, dan Isu Ekonomi.

Delegasi DPR RI juga memenuhi undangan menghadiri *the Sixth Ordinary Session of the Pan African Parliament* (PAP) di Ethiopia pada tanggal 16-18 Januari 2012. Kehadiran Ketua DPR-RI selaku Presiden AIPA di forum tersebut merupakan wujud keberlanjutan harmoni hubungan antara kawasan Asia dan Afrika yang telah terbangun sejak Konferensi Asia Afrika di Bandung, dan perlu terus dipupuk oleh generasi-generasi selanjutnya.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, Sidang ke-7 Konferensi Parlemen Negara-negara Anggota OKI (PUIC) dan sidang-sidang terkait lain telah dilaksanakan pada tanggal 24-31 Januari 2012 di Palembang, Sumatera Selatan. Sidang yang dihadiri oleh 38 Delegasi Parlemen Negara-negara Anggota OKI dan 10 Observer dari berbagai organisasi internasional dan regional ini, telah berjalan lancar dan sukses. Melalui sidang-sidang yang berjalan dengan penuh dinamika, konstruktif dan produktif telah dihasilkan sejumlah keputusan penting yang berkaitan dengan berbagai isu dan tantangan yang dihadapi dunia Islam yang dituangkan dalam bentuk Resolusi-resolusi, Deklarasi Palembang, dan juga Komunike Akhir (*Final Communique*).

Deklarasi Palembang memuat pandangan, sikap, dan juga komitmen PUIC terhadap berbagai isu dan tantangan yang dihadapi masyarakat dan dunia Islam, khususnya terkait dengan upaya-upaya pemajuan demokrasi, perdamaian dan keadilan, serta peningkatan solidaritas dan kesejahteraan di antara sesama Negara Muslim. Peran penting Indonesia dalam Konferensi PUIC Palembang, juga ditunjukkan dengan menyelenggarakan Konferensi I anggota-anggota Parlemen Perempuan Muslim PUIC yang merupakan inisiatif Indonesia.

Sidang Dewan yang terhormat,

Delegasi DPR-RI juga telah menghadiri *The Third G-20 Speakers' Consultation* di Riyadh, Arab Saudi, pada tanggal 25-26 Februari 2012. Pertemuan yang membahas tiga topik utama, yaitu *Global Dialogue of Cultures, Financial Crisis and its Impact on Global Economy*, dan *Energy for Sustainable Development* tersebut, pada akhirnya menghasilkan sebuah *Joint Communique*. Dalam proses pembahasan *Joint Communique*, Delegasi DPR-RI secara aktif mengusulkan berbagai masukan, sehingga sebagian besar usulan DPR-RI tersebut dapat diterima peserta sidang. Dalam kesempatan pertemuan itu, DPR-RI juga mengundang kontribusi dan investasi langsung dari negara-negara anggota G-20 dalam pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

Ketua DPR-RI sebagai Presiden AIPA pada 2-4 April, menghadiri pertemuan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Phnom Penh, Kamboja, memimpin Delegasi Ketua-Ketua Parlemen Anggota AIPA dalam pertemuan dengan para Kepala Pemerintahan/Kepala Negara Anggota ASEAN. Mewakili Parlemen ASEAN, Ketua DPR menyampaikan statemen perlunya terus menerus ditingkatkan kerjasama dan koordinasi antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam mewujudkan pembentukan Komunitas ASEAN 2015 yang memerlukan keterlibatan seluruh institusi dan elemen negara, Pemerintahan dan masyarakat. Ketua DPR menyampaikan perlunya hubungan antara AIPA dan ASEAN yang visioner, intensif, koperatif dan fokus pada *problem solving*. Tidak banyak waktu yang tersisa untuk mencapai tujuan Komunitas ASEAN tersebut, sehingga sangat diperlukan dorongan penguatan integrasi ASEAN yang diselaraskan dalam 3 (tiga) pilar, termasuk pilar sosial budaya yang mencakup banyak bidang. Dengan tema keketuaan ASEAN tahun ini, yaitu "ASEAN: One Community, One Destiny", kiranya dapat menjadi jargon yang makin memperkuat solidaritas dan semangat memacu diri demi meraih kemajuan dan kesejahteraan yang merata bagi setiap orang, masyarakat, bangsa-bangsa ASEAN.

Sidang *Inter-Parliamentary Union* (IPU) ke-126 di Kampala, Uganda baru saja berlangsung pada tanggal 31 Maret sampai dengan 5 April 2012 dengan tema adalah *Promoting and practicing good governance as a means of advancing peace and security*. Sidang ini juga diikuti oleh tiga sidang *standing committee*. Pada Sidang ini, telah terpilih kembali secara aklamasi oleh pertemuan anggota parlemen perempuan IPU Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si., Wakil Ketua BKSAP DPR RI, untuk periode kedua sebagai *President of the Coordinating Committee for Woman Parliamentarians* IPU, untuk periode kedua.

Sidang Dewan yang terhormat,

Ada satu hal yang menjadi atensi besar bagi Pimpinan, terutama berkaitan dengan kinerja Badan Kehormatan DPR-RI. Langkah-langkah Badan Kehormatan dalam menegakkan kode etik dan citra Dewan, disambut baik. Banyak keputusan yang cukup positif, terutama dalam hal penegakan disiplin para anggota Dewan. Usulan Badan Kehormatan untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan Kode Etik dan Tata Beracara adalah sejalan dengan rencana revisi UU No. 27 tahun 2009 tentang MD3, yang sedang dipersiapkan oleh Badan Legislasi. Untuk itu, Badan Legislasi DPR telah melakukan *workshop* dengan tema "Menata Parlemen Yang Demokratis, Efektif dan Akuntabel".

Untuk menjadikan parlemen yang akuntabel, tidak sekedar mengubah peraturan perundang-undangan, tetapi yang penting bagaimana setiap Anggota menyadari tugas konstitusional yang diemban oleh setiap anggota DPR. Apapun yang kita lakukan akan menjadi

tolok ukur bagi masyarakat untuk menilai terhadap wakil-wakil yang telah mereka pilih dalam Pemilu Legislatif.

Demikianlah beberapa hal penting atas capaian pelaksanaan tugas konstitusional DPR pada Masa Persidangan III ini. Kita harus menyadari masih banyak kekurangan yang harus kita benahi dalam kerangka pelaksanaan tugas konstitusional DPR, khususnya pada pelaksanaan fungsi legislasi. Kiranya kekurangan pelaksanaan fungsi legislasi dapat kita kejar pada Masa Persidangan IV mendatang, sehingga target prioritas tahun 2012 dapat tercapai pada akhir tahun ini.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.

KETOK 3 X

Jakarta, 12 April 2012

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,**

Dr. H. Marzuki Alie